

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dari beberapa metode yang mendasari analisis peran sektor pertambangan mineral terhadap peran ekonomi dan distribusi pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan instrumen seperti Model Tabel I-O Provinsi Jawa Barat tahun 2010 untuk analisis keterkaitan antarsektor dan angka pengganda ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku untuk analisis Kuosien Lokasi (LQ) dan analisis pengaruh distribusi pendapatan per kapita sektor pertambangan mineral terhadap Provinsi Jawa Barat, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk analisis perubahan kinerja antarsektor, dan proyeksi peramalan tahun ke depan,

6.1 Kesimpulan

1. Pada keterkaitan hulu (α_j) dan keterkaitan hilir (β_i) sektor pertambangan mineral sebesar 0,6954 (<1) di peringkat 21 dan 0,7632 (<1) di peringkat 14, dimana jumlah investasi untuk peningkatan nilai tambah dan keterkaitan penggunaannya masih rendah terhadap antarsektor ekonomi lainnya.
2. Pada pengganda ekonomi sektor pertambangan mineral dalam model transaksi I-O tahun 2010 Provinsi Jawa Barat (>1). Pada pengganda output = 1,5367, pengganda investasi = 1,2552, pengganda kesempatan kerja = 1,2749, pengganda pendapatan = 1,3442, pengganda nilai tambah = 1,2700 dan pengganda surplus = 2,1578, dimana sektor tersebut dapat memberikan pendapatan ekonomi yang tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan investasi.

3. Nilai Kuosien Lokasi (LQ) sektor pertambangan mineral rata-rata = 0,1143 (<1), dimana sektor tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan daerah Provinsi Jawa Barat bahkan memerlukan impor antarsektor dari daerah lain.
4. Pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan mineral sebesar 4,4529 dengan pergeseran bersih (PB) sebesar 3,5447, bahwa sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang progresif atau maju di tahun 2003-2013, sehingga berpeluang meningkatkan nilai tambah dan jumlah output untuk diekspor dan mendirikan kesempatan kerja bagi pengembangan sektoral.
5. Sektor pertambangan mineral mempengaruhi distribusi pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat yang masih kecil peranannya bila dibandingkan antarsektor ekonomi lainnya dengan menggunakan estimasi model ekonometrika. Dimana pengujian dilakukan 3 (tiga) uji kriteria yaitu : berdasarkan kriteria ekonometrika, bahwa koefisien sektor tersebut bernilai (+) terhadap rasio gini sebesar 5,6027. Berdasarkan kriteria statistika, bahwa jika kenaikan 1 % (persen) sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 5,6027 %. Berdasarkan uji ekonomi, bahwa koefisien sektor tersebut memiliki elastisitas = 5,6027 bernilai (+) artinya mempengaruhi distribusi pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga (std. Error) sebesar 0,3918 % (persen).
6. Konvergensi indeks PDRB/kapita Provinsi Jawa Barat masih belum konvergen. Hal tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat indeks PDRB/kapita kabupaten/kota yang masih <100 yaitu : Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang,

Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

6.2 Saran

Berikut akan dipaparkan saran sebagai upaya memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut, yaitu :

- 1) Dalam mewujudkan konsep otonomi daerah wilayah regional dan pengembangan pertambangan yang berkelanjutan apabila dalam menggali SDA (Sumber Daya Alam) yang tidak terbarukan diharapkan lebih baik pada titik akhir sebagaimana pada titik awal walaupun akan digantikan dengan Sumber Daya terbarukan melalui investasi dan penemuan oleh manusia.
- 2) Meningkatkan nilai tambah sebagai hasil program pengembangan wilayah fisik dan nonfisik yang bermanfaat bagi peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat di sekeliling wilayah pertambangan untuk pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan, serta memperbanyak menggunakan produk lokal di daerahnya.
- 3) Berdasarkan laporan eksplorasi ESDM tahun 2013-2014, produksi daripada pertambangan mineral masih berpotensi untuk mengembangkan jumlah produksi baik golongan mineral logam, nonlogam maupun batuan. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan kegiatan eksplorasi sumber daya mineral agar meningkatkan sumber dana lokal dan pajak-pajak potensial sehingga meningkatkan PAD dan tidak bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.
- 4) Selain itu juga perlu adanya pengembangan antarsektor yang terbelakang untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperluas jangkauan sarana transportasi dan

komunikasi agar semakin banyak masyarakat tradisional yang menggunakannya. Selanjutnya pemerintah harus lebih meningkatkan pendidikan, pelatihan dan informasi yang memadai bagi tenaga kerja guna mendorong inovasi bagi peningkatan produksi sumber daya potensial.

- 5) Untuk peran pemerintah bagi ketidakmerataan distribusi antarsektor ekonomi tersebut dengan cara melakukan redistribusi pendapatan misalnya melalui penerapan pajak progresif, memberikan tunjangan-tunjangan bagi masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi tersebut yang berpendapatan rendah dan menyediakan dana untuk menciptakan barang bermutu untuk kepentingan publik. Selain itu juga pemerintah harus berupaya dalam memperbaiki keadaan industri pertambangan mineral menurut Undang-Undang No: 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara.